**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DESA DI DESA SIALANG KAYU BATU KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau*

WIWI YULIASRI

NPM : 177310419

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Pada kesempatan ini Penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Skripsi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

4. Bapak Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis.
7. Teristimewa Penulis haturkan kepada Ayahanda Rohman, Ibunda Ridhawati Hsb. Dan Adik saya Adam Muliawan yang telah melimpahkan kasih sayang, support moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada Penulis.
8. Kepala Desa, Pengelolah/Pengurus perpustakaan Desa dan masyarakat yang telah membantu penulis dalam memberian informasi dan data pada pelaksanaan penelitian.
9. Kepada sahabat saya Rahmadania Hasmidah, Fanny Ramadani, Putri Sundari, Lastri Agronelita, Ikhroma Zahara Arda dan Rifan Aditya yang selalu menemani penulis serta memberi support yang tiada hentinya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas A yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih selama ini telah menemani penulis dalam perkuliahan dan tugas akhir dalam meraih sarjana.

11. Kepada teman seangkatan, kakak-kakak, abang-abang dan adik-adik di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang membantu penulis dan memberi support tiada hentinya.

Penulis sudah berupaya memberikan hasil terbaik untuk Usulan Penelitian ini, namun Penulis menyadari bahwa Karya ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan karya ini di masa mendatang dari semua Pihak. Harapan penulis semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Pekanbaru, 06 September 2021

Penulis

Wiwi Yuliasri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Kegunaan Penelitian	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	17

2. Konsep Pemerintahan	19
3. Konsep Fungsi Pemerintahan	20
4. Konsep Manajemen Pemerintahan	22
5. Konsep Pemerintahan Desa	24
6. Konsep Peranan	27
7. Konsep Minat Baca	30
8. Konsep Perpustakaan Desa	32
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pemikiran	45
D. Konsep Operasional	46
E. Operasional Variabel	48
BAB III: METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan Penelitian	50
D. Teknik Penetapan Informan	51
E. Jenis dan Sumber Data	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	55
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	57
1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	57
2. Geografis Kabupaten Pelalawan.....	58
3. Letak Wilayah Dan Geografis Kecamatan Bunut	61
4. Luas Dan Batas Wilayah Desa Sialang kayu Batu	62
5. Visi dan Misi desa Sialang Kayu Batu.....	62
6. Struktur Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu.....	63
B. Keadaan Penduduk Desa Sialang Kayu batu	64
1. Tingkat Pendapatan Dan Mata Pencaharian	64
2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	65
C. Gambaran Umum Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu	66
1. Sejarah Singkat Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu	66
2. Visi dan Misi Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu	67
3. Struktur Organisasi Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu	68
4. Pemustaka Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu.....	69
5. Layanan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu	69
6. Kerjasama Desa Sialang Kayu Batu	69
7. Anggaran	70
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Indentitas Informan	71

B. Hasil Penelitian Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	72
1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator	73
2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator	78
3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Mobilisator	83
C. Penerapan Standar Nasional Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa	88
1. Perencanaan Perpustakaan Desa	90
2. Pelaksanaan Perpustakaan Desa	92
3. Pengawasan Perpustakaan Desa	93
4. Pelaporan Perpustakaan Desa	94
5. Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan Desa	96
BAB VI : PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	101
DOKUMENTASI.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Desa di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelawawan.....	11
1.2 : Fasilitas yang terdapat pada perpustakaan desa Sialang Kayu Batu.....	12
1.3 : Data Pengunjung, Peminjam dan Pengguna Layanan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu.....	14
II.1: Operasional Variabel Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.....	48
III.1 : Daftar Key Informan dan Informan	50
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian.....	55
IV.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2019	60
IV.2 : Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020	61
IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	64
IV.4 : Mata Pencaharian Masyarakat desa Sialang Kayu batu.....	65
IV.5 : Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Menurut Tingkat Pendidikan	66
IV.6 : Susunan Jabatan Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu	68
IV.7 : Daftar Pemustaka Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu.....	69

V.1	: Identitas Informan Penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	71
V.2	: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Motivator	78
V.3	: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Fasilitator.....	83
V.4	: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Mobilisator.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1: Kerangka Pemikiran tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	46
IV.1 : Struktur Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu.....	63

PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwi Yuliasri
Npm : 177310419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Atas nama yang didaftarkan pada ujian komprehensif penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 06 September 2021

Wiwi Yuliasri

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DESA DI DESA SIALANG KAYU BATU KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Wiwi Yuliasri

Penelitian ini mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan minat baca di masyarakat pedesaan. Berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan penyelenggaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan desa dan bagaimana penerapan Standar Nasional perpustakaan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berujuan untuk menggali lebih dalam mengenai fakta tentang Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan perpustakaan desa di desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sudah berdiri sejak tahun 2017 dan menerapkan peraturan perpustakaan nasional tentang Standar Nasional perpustakaan desa/kelurahan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sialang Kayu Batu No.141/SK-PD/SKB/2020/14. Peran pemerintah sebagai motivator dengan menjadi pendorong serta pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Adapun peran pemerintah desa sebagai fasilitator, pemerintah desa sudah memberikan fasilitas yang baik. Adapun peran pemerintah desa sebagai mobilisator, pemerintah desa mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kepentingan perpustakaan. Adapun penerapan Standar Nasional Perpustakaan desa diukur dalam 5 tahapan yaitu: Perencanaan sudah cukup baik dilakukan dalam pengelolaan perpustakaan desa. Pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan Kepala Perpustakaan desa/Kelurahan. Pengawasan sudah cukup baik dengan selalu memperhatikan kondisi perpustakaan langsung. Pelaporan dilakukan dengan baik kepada pemerintah desa melalui pengurus/pengelola perpustakaan. Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan desa bersumber dari dana desa untuk kebutuhan sarana dan prasarana dan bahan koleksi perpustakaan desa sudah cukup maksimal

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, pengelolaan, Standar Nasional Perpustakaan Desa

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGING THE
VILLAGE LIBRARY IN SIALANG KAYU BATU VILLAGE, BUNUT SUB-
DISTRICT, PELALAWAN DISTRICT**

ABSTRACT

This study examines the role of the village government in the management of the village library in Sialang Kayu Batu village, Bunut district, Pelalawan district. The village government has a very influential role in efforts to increase reading interest in rural communities. Based on the regulation of the Head of the National Library of the Republic of Indonesia Number 6 of 2017 concerning National Standards for Village / Village Libraries covering: planning, implementation, supervision, reporting, budgeting and implementation. This study aims to determine how the role of the village government in the management of village libraries and how to implement the National Standards for village libraries. This study uses a qualitative descriptive research method that aims to dig deeper into the facts about the role of the village government in managing village libraries in the village of Sialang Kayu Batu, Bunut District, Pelalawan Regency. The Sialang Kayu Batu village library has been established since 2017 and implements a national library regulation concerning National Standards for village / kelurahan libraries in accordance with the Decree of the Village Head of Sialang Kayu Batu No. 141 / SK-PD / SKB / 2020/14. The role of government is as a motivator by being a driving force and encouragement or fostering motivation to increase people's interest in reading. As for the role of the village government as a facilitator, the village government has provided good facilities. As for the role of the village government as a mobilizer, the village government fully supports the interests of the library. The application of the National Standard for Village Libraries is measured in 5 stages, namely: Planning is good enough in managing the village library. Implementation is in accordance with the regulations of the Head of the Village / Village Library. Supervisors are good enough by always paying attention to the condition of the library directly. Reporting is done well to the village government through library administrators / managers. Village library implementation budget is sourced from village funds for facilities and infrastructure needs and village library collection materials are sufficiently maximal.

Keywords: *Role of Village Government, management, National Standard of Village Libraries*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 alenia keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut, maka disusun Pemerintah Indonesia secara bertingkat yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Salah satu tingkat pemerintahan terendah dan terlemah adalah Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Untuk lebih menyukseskan pemberdayaan tersebut sangat dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah .

Desa adalah lembaga pemerintahan dengan wilayah hukum yang berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Setiap desa di seluruh wilayah nusantara mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat strategis karena menyatu dengan masyarakat dalam kehidupan desa yang harmonis, selaras dan seimbang. Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangun dan kemasyarakatan perlu dilengkapi, difasilitasi, dan didukung dengan pembentukan lembaga-lembaga layanan sosial dan layanan publik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu lembaga layanan publik tersebut ialah perpustakaan desa. Perpustakaan desa berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan minat baca bagi masyarakat pedesaan. Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan penyelenggaraan.

Perpustakaan desa merupakan perpustakaan umum yang berada di lingkungan desa/kelurahan sehingga menjadi ujung tombak bagi penyediaan informasi di tingkat desa. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah dan melayani masyarakat umum. Demikian juga dengan perpustakaan desa, adalah perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah desa/kelurahan dan melayani masyarakat

umum di tingkat desa/kelurahan. Dari pengertian tersebut maka secara substantif pengelolaan perpustakaan desa sebenarnya hampir sama dengan pengelolaan perpustakaan lain. Perpustakaan desa mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi agar perpustakaan desa/kelurahan dapat berjalan dengan baik. Standar perpustakaan yang dimaksud meliputi koleksi, sarana prasarana, pengolahan, layanan dan SDM/pustakawan.

Perpustakaan Desa menurut Surat Keputusan SK Menteri dalam Negeri dan otonomi daerah nomor 3 tahun 2001 perpustakaan desa atau kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana atau media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/ kelurahan.

Menurut Sutarno NS, tugas perpustakaan secara garis besar adalah :

1. Tugas menghimpun informasi adalah kegiatan mencari, menyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai/lengkap baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang di sesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakai serta mutakhir.
2. Tugas mengelola meliputi proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan, pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusur, ditemukan kembali dan diakses oleh pemakai. Pekerjaan pengolahan mencakup pemeliharaan dan perawatan agar seluruh koleksi perpustakaan tetap dalam kondisi bersih, utuh

dan baik. Sedangkan kegiatan pelestarian adalah dalam rangka preservasi konservasi karena untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan dokumentasi.

3. Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, teknologi dan budaya masyarakat di sekitarnya.

Pendidikan diarahkan pada tujuan yang hendak di capai seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (2003:8) sebagai berikut: “pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta tanggung jawab”. Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang dapat di capai, diantaranya melalui perpustakaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Aspek-aspek pengembangan perpustakaan dan kepastakawanan sudah dikaji dan diatur rapi sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Perpustakaan desa merupakan suatu lembaga yang menyediakan berbagai bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar dari, oleh dan untuk masyarakat. Perpustakaan desa

merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang berkedudukan di suatu desa/kelurahan, sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada di suatu wilayah pedesaan. Maka perpustakaan desa tempat sarana belajar masyarakat dimana idealnya tersedia berbagai sumber informasi dalam berbagai format. Pada hakikatnya perpustakaan desa memiliki peran yang strategis untuk masyarakat desa dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman adanya perpustakaan desa untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sebagai penyedia sumber informasi yang cepat, tepat, lengkap dan murah sebagai salah satu program wajib belajar untuk menunjang keterampilan masyarakat. Fungsi utama dari perpustakaan desa adalah untuk menyediakan layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti Pendidikan, ilmu pengetahuan dan rekreasi dengan menyediakan bacaan hiburan sehat. Serta mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendayagunakan bahan pustaka tercetak maupun terekam sebagai pusat komunikasi informasi.

Perpustakaan desa bermanfaat karena berperan sebagai tempat sarana pendidikan sepanjang hayat dengan belajar sendiri sehingga masyarakat dapat belajar dan menggali ilmu secara mandiri dengan memanfaatkan fasilitas koleksi dan kegiatan pelatihan serta buku yang disediakan perpustakaan di desa. Kemudian sebagai penghimpun sumber informasi seperti dalam buku, jurnal, ebook dan alat peraga edukatif yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa serta mengembangkan minat baca melalui layanan perpustakaan desa. (Ramadhani, 2021)

Menurut Sutarno NS Perpustakaan desa adalah suatu lembaga layanan publik yang berada di desa atau sebuah unit layanan yang dikembangkan dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Selain itu perpustakaan desa adalah perpustakaan rakyat sebagai salah satu aspek dari pada urusan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 1951 (LN Nomor 64 Tahun 1956) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 (LN Nomor 110 Tahun 1951) Sebagai urusan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada daerah.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan desa merupakan salah satu media atau sarana lembaga layanan publik yang berada di desa (lingkungan masyarakat), sebagai sumber informasi yang bertujuan dalam meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat desa.

Secara umum tujuan penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menunjang program wajib belajar
2. Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup bagi masyarakat.
3. Menyediakan buku-buku pengetahuan. maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat diberbagai bidang misalnya: Pertanian, Perikanan, peternakan, perindustrian pengolahan Pemasaran dan lain-lain.

4. Menggalakkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri.
5. Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan, pembangunan dan menamba wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan.
6. Memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dalam hal- hal yang bersifat membangun.
7. Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.

Perpustakaan Desa juga memiliki suatu peranan yaitu meningkatkan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. eksistensi diharapkan mampu mencerminkan kemajuan dan mereflesikan kehidupan budaya masyarakat. Perpustakaan dapat dijadikan sebagai sarana diskusi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta memperkuat kesatuan dan persatuan.

Perpustakaan desa dan masyarakat yang membutuhkan informasi ibarat dua sisi mata uang yang saling berhubungan yang tak dapat dipisahkan. Hal itu dapat terwujud manakala perpustakaan desa sudah siap melayani dengan sumber informasi yang memadai. Sementara masyarakat mampu memahami, maghayati dan memaknai pentingnya informasi dalam kesehariannya (Sutarno,2006).

Adapun peranan penyelenggaraan perpustakaan desa dapat dilihat lebih lanjut.

Yakni sebagai berikut :

1. Masyarakat desa sangat memerlukan penerangan berupa buku-buku, bagi masyarakat desa mendapatkan buku adalah usaha yang cukup sulit setidaknya tidaknya seseorang harus pergi ke kota untuk mendapatkannya dan harga buku pun cukup mahal.
2. Masyarakat desa merupakan lumbung bagi negara. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan memerlukan penerangan berupa buku atau bahan bacaan lainnya.
3. Untuk mencapai swesambada pangan yang berkelanjutan, diperlukan pembinaan dan penerangan melalui buku-buku.
4. Ilmu pengetahuan berkembang dari masa kemasa. Diharapkan perpustakaan desa ini mampu meningkatkan sumber daya manusia masyarakat desa agar tidak ketinggalan.

Dari Penjelasan di atas, Perpustakaan desa sangat memiliki peranan penting dalam mendukung tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi salah satu sumber informasi serta pembelajaran bagi masyarakat. Maka dari itu, perpustakaan desa sangat bermanfaat dan penting bagi masyarakat di sekitarnya sebagai sarana pelayanan informasi publik.

Perpustakaan menjadi pusat informasi yang tidak pernah ada habisnya untuk digali, dikembangkan dengan tujuan agar tercipta masyarakat yang terdidik, terbiasa

membaca dan berbudaya tinggi. Masyarakat yang demikian senantiasa mengikuti perkembangan karena ada keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengetahui informasi terbaru. Salah satu jenis perpustakaan di Indonesia adalah perpustakaan umum.

Menurut Sutarno (2003:32) bahwa perpustakaan umum sering diibaratkan sebagai Universitas Rakyat atau Universitas Masyarakat dengan maksud bahwa perpustakaan umum merupakan suatu lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai sumber informasi. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perpustakaan umum harus mampu memenuhi kebutuhan setiap penggunanya dan berperan aktif dalam menyediakan, mengolah, menyimpan dan menyajikan sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan setiap pengguna. Setiap warga dapat menggunakan perpustakaan tanpa dibedakan pekerjaan, kedudukan, kebudayaan, dan agama. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah Lembaga Teknis Daerah Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.

Pembangunan yang dilaksanakan telah banyak membuahkan hasil bagi kehidupan penduduk ke arah yang lebih baik, sebagian besar telah mengalami

perubahan dari desa tradisional/desa swadaya menjadi swakarya ataupun desa swasembada. Perubahan itu dapat dilihat dari ciri-cirinya pada indikator mata pencaharian, produksi, pendidikan, kelembagaan, sarana dan prasarana, penerapan teknologi baru, serta adat istiadat. (Bangun, 2014)

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, desa Sialang Kayu Batu merupakan desa Swakarya dengan jumlah penduduk sebanyak 1.478 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 762 jiwa, dan perempuan sebanyak 713 jiwa.

Desa swakarya adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, di mana adat-istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan diimbangi dengan bertambahnya prasarana desa. Adat yang merupakan tatanan hidup masyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan sosial. (Bangun, 2014)

Desa swakarya ini mulai mampu menyelenggarakan rumahnya tangganya sendiri, administrasi cukup baik, dan LKMD mulai berfungsi menggerakkan peran serta, masyarakat dalam pembangunan. Ciri-ciri desa swakarya adalah:

1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.

2. Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi.
3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
4. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Kecamatan Bunut adalah salah satu kecamatan induk pembentuk Kabupaten Pelalawan, yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, nomor: 53 tahun 1999. Kecamatan Bunut mempunyai luas wilayah 475,91 Km², terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 1.478 jiwa.

Tabel I.1 : Jumlah desa di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelawawan

No.	Nama Desa, Kelurahan
1	Bagan Labah (Bagan Laguh)
2	Balam Merah
3	Keriung
4	Lubuk Mandian Gajah
5	Lubuk Mas
6	Merbau
7	Pangkalan Bunut Terap (Pangkalan Bunut)
8	Petani
9	Sialang kayu Batu
10	Sungai Buluh

Sumber: Kantor Camat Bunut, 2020

Desa Sialang Kayu Batu merupakan satu-satunya desa di Desa Kecamatan Bunut yang memiliki perpustakaan yang di beri nama “Sialang Cerdas”. Berdasarkan pengamatan, desa Sialang Kayu Batu mendirikan perpustakaan desa sejak tahun 2017. Perpustakaan yang sudah berdiri sejak kurang lebih 3 tahun ini sudah memiliki berbagai fasilitas. Perpustakaan desa “Sialang Cerdas” merupakan wewenang Pemerintah Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sialang Kayu Batu No.141/SK-PD/SKB/I2020/14 tentang Pembentukan Pengurusan Perpustakaan Desa ‘Sialang Cerdas’. Berikut fasilitas-fasilitas yang terdapat pada perpustakaan desa Sialang Kayu Batu.

Tabel.I.2 : Fasilitas Yang Terdapat Pada Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

No.	Fasilitas	Jumlah
1	Buku	3.236 eksemplar
2	<i>E-Book</i>	200 <i>link</i>
3	Komputer	6
4	Televisi	1
5	<i>Printer</i>	2
6	<i>Wifi Internet</i>	2
7	Kipas Angin	3
	Jumlah	3.450

Sumber: Kantor Desa Sialang Kayu batu, 2020

Dari data diatas, dapat di jelaskan bahwa Perpustakaan tersebut memiliki beberapa fasilitas salah satunya buku. Fasilitas buku yang terdapat pada perpustakaan ini berasal dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dimana, Pemerintah Kabupaten memberikan buku sebanyak 236 eksemplar, Kabupaten Provinsi memberikan buku sebanyak 1000 eksemplar, dan Pemerintah Pusat memberikan buku sebanyak 2000 eksemplar. Buku ini terdiri dari buku pelajaran, novel, buku-buku kisah dan buku-buku panduan. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga memberikan buku berbasis elektronik atau *E-book* sebanyak 200 link. Selain buku dan *E-book*, fasilitas lain yang terdapat pada perpustakaan ini yaitu 6 buah komputer, 1 buah televisi, 2 buah *printer* serta 2 buah *wifi internet*.

Berdasarkan tugas dan wewenang kepala desa, kepala desa mempunyai peran penting dalam pengelolaan aset desa. Salah satu aset desa yang terdapat di desa Sialang Kayu Batu yaitu perpustakaan desa. Sehingga kepala desa Sialang Kayu Batu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perpustakaan desa sesuai dengan Surat Keputusan Pengurusan Perpustakaan Desa Nomor 141/SK-PD/SKB/2020/14.

Berbagai kalangan masyarakat telah memanfaatkan perpustakaan tersebut dengan baik. Namun terdapat permasalahan pada Perpustakaan Desa dimana tidak pernah dilakukan penambahan koleksi buku lagi yang mengakibatkan kebutuhan informasi masyarakat desa kurang terpenuhi sehingga menurunnya minat baca masyarakat. Disisi lain, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya perpustakaan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat merupakan pekerjaan rumah yang mesti di galakkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan minat baca sehingga esensi dari kehadiran perpustakaan desa benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Perpustakaan desa seharusnya berperan sebagai pusat pelayanan informasi dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari koleksi buahan pustaka.

Tabel I.3 : Data Pengunjung, Peminjam dan Pengguna Layanan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

No.	Tahun	Jumlah Orang
1	2017	51 Orang
2	2018	95 Orang
3	2019	153 Orang
4	2020	71 Orang
	Total	370 Orang

Sumber: Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

Pada tabel diatas di tuliskan, pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan adalah 51 orang, pada tahun 2018 bertambah menjadi 95 orang. Pada tahun 2019 bertambah lagi menjadi 153 orang, namun pada tahun 2020 turun kembali menjadi 71 orang.

Dengan begitu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan perpustakaan desa di desa Sialang Kayu Batu. Untuk menjamin mutu dan pelaksanaan tata kelola perpustakaan desa, pemerintah menerbitkan peraturan melalui peraturan kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa / Kelurahan. Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pegawasan, Pelaporan,

Pegangan dan penyelenggara perpustakaan desa/kelurahan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Desa / Kelurahan.

Mengacu pada kebijakan Standar Nasional perpustakaan desa tersebut, penulis menyimpulkan beberapa fenomena yang terjadi, yaitu:

1. Terindikasi kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai pentingnya perpustakaan desa dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat,
2. Terindikasi kurangnya koleksi buku pada Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana penerapan standar nasional pada pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Standar Nasional pada pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu Pemerintahan. Serta dapat memberikan kontribusi atau saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis maupun pengelola bidang pengembangan masyarakat atau referensi bagi penulis yang ingin memperdalam mengenai masalah peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Perpustakaan desa di Desa Sialang kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk menggerakkan dan meningkatkan masyarakat serta ikut aktif dalam proses pelayanan publik.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam penelitian.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah kybernology, kybernology disebut juga dengan ilmu pemerintahan baru. Menurut Ndraha (2011:7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik, dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ndraha (2005:7) mengemukakan ada beberapa ruang lingkup ilmu pemerintahan, yaitu:

- a. Yang diperintah,
- b. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dalam layanan civil),
- c. Pemerintahan,
- d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah,
- e. Hubungan pemerintah.

Menurut Syafie (2013:12) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa atau gejala pemerintahan.

Menurut Syafie (2003:23-24) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Musanef (2002:8) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas tersebut dengan masyarakat yang lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala upaya negara untuk mencapai tujuannya.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dengan yang diperintah yaitu masyarakat. Dimana pemerintah diharapkan mampu untuk

memberikan dan melindungi kebutuhan dan tuntutan masyarakat berupa jasa publik, layanan sipil, dan hubungan pemerintahan secara baik dan benar.

2. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia.

Konsep pemerintahan menurut Rasyid (dalam Rahyunir Rauf, 2015:28) yaitu: “Apa yang dilakukan pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*)”.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan adalah suatu proses menegakkan dan memelihara keadilan, serta memberi pelayanan untuk masyarakat.

Menurut Rasyid (2001:14-16) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat dalam menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan

masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.

Selanjutnya menurut Mahfud (2001:66) pemerintahan dalam arti luas di definisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah hanya mencakup organisasi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif).

Menurut Ndraha (2011:3) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan jasa-jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2002:3) pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan “pe-” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organ yang melakukan pekerjaan mengurus, serta mendapatkan akhiran “an-” menjadi pemerintahan, yang berarti cara, perbuatan atau urusan, perihal yang dilakukan oleh badan yang berwenang.

3. Konsep Fungsi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Ndraha (2003 : 75) mengemukakan fungsi pemerintahan sebagai jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan masyarakat. Karena masyarakat menghendakan adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu, menurut Ndraha (dalam Labolo, 2006:25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

1. Fungsi Premier (pelayanan)

Fungsi premier fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat di privatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun di dalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan pemerintah.

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:159) manajemen merupakan cara bagaimana menciptakan effectiveness usaha secara efficient dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Siswanto (2005:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, permotivasi, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja mencapai tujuan.

Menurut Supriyanto (2009:41) manajemen pemerintahan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Manajemen pemerintah membuat keputusan-keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring atau evaluasi.

- b. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya menurut Waluyo (2007:5) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Ndraha (2003:160) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
- c. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
- d. Kontrol pemerintahan

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sampai dengan proses evaluasi.

5. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan dalam membuat serta menerapkan hukum dan Undang-Undang di wilayah tertentu. Menurut Samuel Edward “Pemerintah harus memiliki kegiatan terus menerus, negara tempat kegiatan itu selalu tetap berlangsung, pejabat yang memerintah, cara, metode, dan sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli hak dan asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan sub sistem dari sistem penyelenggaran pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menjelaskan bahwa “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa”.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan Pemerintah Pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintah Desa yang mengatur tentang Pemerintah Desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya.

Dengan gambaran diatas, maka dapat dikatakan bahwa perangkat Pemerintah Desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam terlaksananya Pemerintah Desa yang menyangkut masalah pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya.

b. Kewenangan Pemerintah Desa

Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang telah di atur dalam regulasi yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa yang di maksud

adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain yang di bantu oleh perangkat desa atau yang di sebut nama lain. Adapun beberapa kewenangan yang melekat pada pemerintah desa adalah: memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman masyarakat desa. Perpustakaan desa merupakan asset desa yang terdapat pada dsa Sialang Kayu Batu.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintah desa termasuk salah satu perangkat pemerintah daerah, pemerintah desa di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan peraturan Pemerintah Daerah. Keduanya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Nurcholis (2011:77), Kepala Desa mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD;

2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat Desa;
6. Membina perekonomian Desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
8. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Konsep Peranan

Pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang seseorang harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain yang menyangkut peran-peran tersebut.

Secara sosiologis, peran merupakan dinamisasi dari status maupun penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga sebagai status subjektif. Jika

seseorang sudah melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia sudah menjalankan suatu peran.

Sedangkan menurut Scott, dalam bukunya Sutarno (2008) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*).
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran

Pemerintah Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintah desa secara keseluruhan. Adapun peran Pemerintah Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator.

1. Motivator

Kata motivator berasal dari kata "Motivasi", menurut Edy Sutrisno (2017: 109) Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa sebagai Motivator diartikan sebagai pendorong, perangsang, pengaruh, dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat dari satu individu ke individu lainnya dengan berbagai cara, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

2. Fasilitator

Kata fasilitator berasal dari kata "Fasilitas", menurut Kotler (2006: 75) fasilitas merupakan segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Jadi fasilitas adalah sumber daya fisik yang ada dalam sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen.

Dari pengertian diatas, pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu orang yang menyediakan fasilitas dalam bentuk fisik dalam kegiatan-kegiatan

pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Serta Pemerintah Desa juga dapat menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

3. Mobilisator

Kata Mobilisator berasal dari kata “Mobilisasi”, menurut (Ignatavicius, Workman, & Rebar, 2017) mobilisasi adalah kemampuan individu untuk melakukan gerakan fisik yang disengaja dari tubuh. Ketika seseorang mampu bergerak, dia biasanya mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari (*activity daily living*)

Berdasarkan pengertian diatas, Pemerintah Desa sebagai mobilisator dalam hal ini orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama.

7. Konsep Minat Baca

Minat baca adalah suatu kegiatan yang timbul karena adanya keinginan dan kesukaan seseorang akan sesuatu, baik benda mati maupun hidup yang membuatnya

merasa senang. Minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi yang bersangkutan paut dengan dirinya.

Menurut KBBI (2002), membaca merupakan aktivitas melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Dalam arti luas, membaca adalah melakukan berbagai kegiatan yang dapat memperakaya pengetahuan serta memperluas wawasan untuk dapat membentuk watak dan sikap yang menyebabkan pengetahuan seseorang bertambah.

Jadi, minat baca adalah menaruh/mencurahkan perhatian terhadap kegiatan membaca. Minat baca seseorang perlu memperoleh rangsangan agar bertumbuh dan berkembang sebaik mungkin (Karnal,2005).

Menurut Mansyur (2018) minat baca adalah tingkat kesenangan yang kuat karena adanya dorongan yang timbul pada diri seseorang dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan kegiatan membaca untuk memperoleh informasi , serta menimbulkan kesenangan dan manfaat bagi dirinya. Pada dasarnya, minat baca tumbuh karena adanya dorongan dari diri masing-masing. Namun, lingkungan juga menjadi faktor utama tumbuhnya minat baca seseorang, sehingga untuk meningkatkannya perlu kesadaran setiap individu serta lingkungan yang mendukung.

8. Konsep Perpustakaan Desa

a. Pengertian Perpustakaan Desa

Perpustakaan merupakan sebagai suatu sistem informasi yang berfungsi menyimpan pengetahuan dalam berbagai bentuk serta pengaturannya sedemikian rupa, sehingga informasi yang diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan tata kelolah perpustakaan desa pemerintah menerbitkan peraturan melalui kepala perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan Desa/ Kelurahan meliputi standar koleksi sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan desa. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan desa adalah salah satu perpustakaan yang bersifat umum yang di bangun di desa, dikembangkan oleh masyarakat desa dan memberikan pelayanan untuk kebutuhan informasi yang di perlukan oleh masyarakat besar dengan cepat dan tepat.

b. Tujuan Perpustakaan Desa

Tujuan perpustakaan desa pada umumnya untuk melayani masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat didesa. Secara detail, pembangunan perpustakaan desa bertujuan untuk:

1. Menunjang kegiatan wajib belajar
2. Menunjang program kegiatan pendidikan seumur hidup dan literasi informasi bagi masyarakat.

3. Menyediakan buku-buku pengetahuan maupun keterampilan untuk mendukung keberhasilan kegiatan masyarakat desa diberbagai bidang kerja seperti pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, dan industri kecil.
 4. Meninggikan minat dan budaya baca masyarakat dengan memanfaatkan waktu luang untuk membaca agar tercipta masyarakat kreatif, dinamis, produktif dan mandiri.
 5. Menyimpan dan mendayagunakan berbagai dokumen kebudayaan sebagai sumber informasi, penerangan dan menambah wawasan pengetahuan masyarakat pedesaan.
 6. Memberikan semangat dan hiburan yang sehat dalam pemanfaatan waktu senggang dengan hal-hal yang bersifat membangun.
 7. Mendidik masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.
- c. Fungsi Perpustakaan Desa

Perpustakaan desa/kelurahan mempunyai fungsi sebagai penyedia layanan informasi bagi masyarakat desa untuk memenuhi kepentingan seperti Pendidikan serta rekreasi. Selain itu, perpustakaan desa juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengorganisasikan dan mendayagunakan bahan pustaka tercetak maupun terekam.
2. Mensosialisasikan manfaat jasa perpustakaan.
3. Mendekatkan buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat.

4. Menyediakan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai pusat komunikasi dan informasi.
5. Menyediakan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagai tempat rekreasi dengan menyediakan bacaan hiburan sehat.

d. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan mencakup 3 hal, yaitu pengembangan koleksi perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, dan pelestarian bahan perpustakaan. Dalam pengembangan koleksi bahan perpustakaan hal yang paling utama adalah keterpakaian bahan perpustakaan untuk dimanfaatkan pemustaka. Sebagaimana Ranganathan mencetuskan lima prinsip perpustakaan, yaitu :

1. *Books are for use* (setiap buku harus digunakan)
2. *Every reader his book* (Setiap pembaca harus ada bukunya)
3. *Every books its reader* (setiap buku harus ada pembacanya)
4. *Save the time of the reader* (menghemat waktu pemustaka)
5. *Library is growing organism* (perpustakaan merupakan organisme yang bertumbuh).

Dari lima prinsip tersebut di atas, tersirat bahwa hal terpenting dalam pengembangan koleksi adalah pemanfaatan bahan perpustakaan.

e. Tugas Perpustakaan Desa

Menurut Sutarno NS, tugas perpustakaan secara garis besar adalah :

4. Tugas menghimpun informasi adalah kegiatan mencari, menyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai/lengkap baik dalam arti jumlah, jenis, maupun mutu yang di sesuaikan dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan keinginan pemakai serta mutakhir.
5. Tugas mengelola meliputi proses pengolahan, penyusunan, penyimpanan, pengemasan agar tersusun rapi, mudah ditelusur, ditemukan kembali dan diakses oleh pemakai. Pekerjaan pengolahan mencakup pemeliharaan dan perawatan agar seluruh koleksi perpustakaan tetap dalam kondisi bersih, utuh dan baik. Sedangkan kegiatan pelestarian adalah dalam rangka preservasi konservasi karena untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan dokumentasi.
6. Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, teknologi dan budaya masyarakat di sekitarnya.

f. Pembangunan Perpustakaan Desa

Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan di lingkungan pemerintah desa/kelurahan. Pembangunan gedung/ruangan khusus perpustakaan serta sarana dan prasarana standar perpustakaan memerlukan anggaran yang

tidak sedikit. Hal ini dapat juga diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat baik melalui penggalangan dana maupun tenaga dalam melakukan pembangunan gedung. Selain mengandalkan APBD dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa/kelurahan juga dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun swasta melalui dana bantuan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Namun untuk dapat menjalin kerjasama perlu juga dilakukan pelatihan terkait dengan strategi untuk menjalin kerjasama tersebut. Jika belum memungkinkan untuk pembangunan gedung perpustakaan, dapat dimanfaatkan ruangan yang ada. Dengan adanya aplikasi inlislite versi 3, koleksi digital dapat dimaksimalkan melalui kerjasama dengan perpustakaan umum daerah yang juga bermitra dengan Perpustakaan Nasional RI dalam memanfaatkan aplikasi inlislite. Tampilan perpustakaan desa dan kelurahan minimal bisa dalam bentuk perpustakaan digital. Perpustakaan desa dan kelurahan hanya perlu sarana dan prasarana komputer serta jaringan untuk mengakses koleksi perpustakaan bagi pemustaka. Selain itu, bisa juga dalam bentuk mobil perpustakaan keliling kelurahan yang didapat dari dana yang bersumber dari 5% APBD, karena sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk perpustakaan desa dan kelurahan.

g. Standar Pengelolaan Perpustakaan Desa

Standar Pengolahan perpustakaan Desa adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima di perpustakaan sampai dengan penempatan di rak yang telah disediakan. Dalam pengolahan terdapat kegiatan berupa inventarisasi,

klasifikasi, katalogisasi, pengecapan, pembuatan perlengkapan perpustakaan, penjajaran kartu dan penyusunan koleksi di rak. Untuk pengelolaan perpustakaan desa terdapat dua standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yaitu SNI 7596:2010 (BSNI, 2010) dan oleh Perpustakaan Nasional SNP 005:2011 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Standar ini menjadi acuan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia. Dalam SNP tentang perpustakaan desa dijelaskan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan

h. Standar Nasional pengelolaan Perpustakaan Desa

Menurut Peraturan kepala perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan ini meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada perpustakaan umum di tingkat desa/kelurahan.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus di kerjakan untuk merealisasikan.

- a. Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
- b. Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap

- a. Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- b. Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

- a. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah hal yang dilaporkan terhadap pelaksanaan tugas perpustakaan itu sendiri.

- a. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa.
- b. Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

5. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan

Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan adalah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan bahan- bahan perpustakaan, bukubuku dan koleksi bahan lainnya.

- a. Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan,
- b. Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan,
- c. Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
- d. Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

Pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang amat penting jika perpustakaan diharapkan dapat diterima keberadaanya oleh masyarakat. Minimal ada tiga faktor penting dalam pengelolaan perpustakaan desa.

1. Faktor utama yaitu Tempat. Tempat, merupakan hal yang penting. Tempat menentukan masalah akses. Jauh dan susahnya mendapatkan bahan bacaan menjadi salah satu sebab jauhnya masyarakat desa pada buku. Terlebih jika perpustakaan berada di dekat balai desa yang posisi atau lokasinya terpencil atau terpisah dari pusat keramaian desa.

2. Faktor kedua yaitu Koleksi dan pengelolaan karena harus memiliki koleksi yang menarik bahan bacaan seperti koran, majalah, maupun buku. Namun tingkat kebutuhan dan modus masyarakat mengonsumsi informasi sekarang ini tidak hanya mengandalkan buku, koran, dan majalah berbasis pohon (kertas), masyarakat saat ini juga mengonsumsi informasi dari internet dan televisi.
3. Faktor ketiga yang bisa mengefektifkan keberadaan perpustakaan desa adalah kegiatan perpustakaan itu sendiri. Salah satu kendala besar mengajak masyarakat datang ke perpustakaan dan membaca buku karena mereka tidak menemukan keterkaitan yang erat antara bacaan dan aktivitas keseharian. Maka dari itu pengelolaan harus seefektif mungkin untuk kebutuhan masyarakat.

Tujuan perpustakaan desa adalah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan perpustakaan dan akses informasi untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya, dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun acuan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Putri Ramadhani, dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan perpustakaan desa di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pendekatan kualitatif. Yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Gampong Lambheu sudah cukup berperan dalam pengelolaan perpustakaan desanya, dapat dilihat dari peran pemerintah gampong sebagai mobilisator (mendukung sepenuhnya untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan minat baca), sebagai fasilitator (sudah memberikan fasilitas yang cukup baik dan sudah berhasil karena sebagian mencari referensi di perpustakaan gampong dan menggunakan sarana prasarana internet yang disediakan), namun sebagai regulator pemerintah gampong belum sepenuhnya dapat menjalankan peraturan Kepala standar nasional tentang pengelolaan perpustakaan gampong. Hal tersebut dikarenakan belum disusunnya qanun gampong, dan SK kepeguruan perpustakaan gampong yang mengatur tentang perpustakaan.

2. Edi Sarwono, dalam skripsinya yang berjudul *“Peran Perpustakaan Desa Dalam Penyediaan Sarana Informasi Bagi Masyarakat Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran perpustakaan desa dalam penyediaan sarana informasi bagi masyarakat di desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Studi kepustakaan, 2. Studi lapangandengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan perpustakaan Desa Curio sangat memberikan manfaat kepada masyarakat, sebagaimana dengan komitmen pemerintah desa untuk terus melakukan upaya penyempurnaan secara maksimal pada aspek fasilitas dan pelayanan. Beberapa kendala peran perpustakaan desa dalam penyediaan sarana informasi adalah kondisi yang terjadi pada aspek fasilitas dan pelayanan yang masih minim sehingga media informasi untuk masyarakat sangat terbatas, serta relokasi anggaran untuk perpustakaan desa masih minim dan belum adanya aturan terkait alokasi anggaran untuk kemandirian perpustakaan menyebabkan ketersediaan koleksi sangat terbatas.
3. Muhammad Syafik Bahaudin, Joko wasisto, dalam jurnalnya yang berjudul *“Peran Perpustakaan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi*

Kualitatif Perpustakaan “Pelita” Desa Muntang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perpustakaan “Pelita” dalam pemberdayaan masyarakat Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga . metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penunjukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sebagai uji keabsahan data. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan “Pelita” mengambil peran dalam bidang pendidikan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Perpustakaan “Pelita” terwujud dalam kegiatan-kegiatan yang dijalankannya. Kegiatan tersebut terbagi menjadi kegiatan rutin dan kegiatan temporer. Kegiatan rutin Perpustakaan “Pelita” terdiri dari pelayanan bahan pustaka, pelayanan komputer dengan internet gratis, serta perpustakaan keliling. Sedangkan kegiatan temporer Perpustakaan “Pelita” terdiri dari pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Perpustakaan “Pelita” memiliki tujuan agar masyarakat peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap literasi, serta membuat masyarakat mandiri dalam arti memiliki tambahan penghasilan. Perpustakaan “Pelita” juga menghadapi beberapa kendala dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakannya. Kendala pertama berkaitan dengan pendanaan. Kendala kedua adalah pandangan negatif masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan. Ketiga adalah tidak adanya dukungan dari

pemerintah desa. Solusi guna menghadapi kendala pemberdayaan tersebut adalah mencari alternatif pendanaan, mengubah pandangan negatif masyarakat, dan percaya pada diri sendiri.

4. Indah Wijaya Antasari, dalam jurnalnya yang berjudul “Perpustakaan “SENENG MACA” sebagai sarana meningkatkan minat baca masyarakat Desa Melung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perpustakaan “Seneng Maca” sebagai sarana meningkatkan minat baca masyarakat Desa Melung. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Perpustakaan “Seneng Maca” Desa Melung dapat menginspirasi desa-desa lainnya untuk melakukan hal yang sama yaitu mendirikan perpustakaan desa sebagai upaya meningkatkan minat baca, yang pada akhirnya dapat membangun masyarakat pembelajar. Informasi dan pengetahuan yang didapatkan akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kedepannya. Diharapkan masyarakat dapat lebih kreatif dan berpengetahuan luas, untuk dapat lebih mandiri. Dalam penelitian ini juga di tuliskan beberapa kendala yang terjadi yaitu:

- a. Koleksi belum diinventaris
- b. Koleksi perpustakaan tidak diolah (diberi nomor klasifikasi)
- c. Tidak ada pencatatan peminjaman buku, dan pengembalian (layanan sirkulasi)

- d. Tidak tercatat nama-nama anggota perpustakaan atau pembaca/pengunjung
- e. Tidak memiliki panduan pengembangan perpustakaan, baik koleksinya maupun layanannya.
- f. Belum ditangani dengan optimal.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

Sumber : Olahan Penulis, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Motivator, yang dimaksud dengan Pemerintah Desa sebagai Motivator yaitu pemerintah desa berperan sebagai pendorong, perangsang, pengaruh, dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat dari satu individu ke individu lainnya dengan berbagai cara, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
2. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator, yang dimaksud dengan pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik
3. Peran Pemerintah Desa sebagai Mobilisator, yang dimaksud dengan Pemerintah Desa sebagai Mobilisator yaitu Pemerintah Desa sebagai orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Pemerintah Desa	a. Peran Pemerintah Desa sebagai Motivator, yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong, perangsang, pengaruh, dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat dari satu individu ke individu lainnya dengan berbagai cara, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan 2. Kunjungan lapangan
	b. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator, dalam hal ini pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia sarana dan prasarana 2. Sebagai narasumber yang baik

	<p>c. Peran Pemerintah Desa sebagai Mobilisator, yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa guna untuk kepentingan bersama.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan gedung2. Penambahan koleksi buku
--	---	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu metode yang diarahkan untuk menggambarkan atau memaparkan apa adanya hasil penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana mestinya (Sugiyono, 2012)

Pendekatan deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk menggambarkan, menerangkan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, kelompok, atau suatu kejadian. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menggali mengenai fakta tentang Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Penulis memilih lokasi ini karena penulias ingin melihat bagaimana pengelolaan pada perpustakaan desa di Desa Sialang Kayu Batu. Selain

itu, desa Sialang Kayu Batu merupakan salah satu desa yang menerapkan perpustakaan desa.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi suatu penelitian

a) Key Informan

Menurut Bagong Suyanto (2005:172) key informan merupakan orang-orang yang mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan di dalam penelitian. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Kabupaten Pelalawan

b) Informan

Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Beberapa informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bendahara desa yang juga selaku pengurus/pengelola perpustakaan
2. 4 orang masyarakat/Pelajar yang mengunjungi perpustakaan desa Sialang Kayu Batu.

Tabel III.1 : Daftar Key Informan dan Informan

No.	Nama	Keterangan	Jumlah(orang)
1	Kepala Desa Sialang Kayu Batu	Key Informan	1
2	Pengurus/Pengelola Perpustakaan	Informan	1
3	Masyarakat/Pelajar	Informan	4
Total			6

Sumber: Olahan Penulis, 2021

D. Teknik Penetapan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompentensi dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Adapun teknik penarikan informan yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2012) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya yaitu orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang objek yang akan diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2012).

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini meliputi:

- a. Catatan hasil wawancara
- b. Hasil observasi lapangan
- c. Data-data mengenai informan

2. Data Sekunder

Hasan (2002) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek kajian yang akan diteliti. Menurut Hasan (2002) Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian observasi digunakan sebagai metode

pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pada objek yang diamati.

2. Wawancara

Hasan (2002) menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2016) dengan melakukan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun media elektronik. Dokumen juga dapat berupa arsip-arsip, atau rekaman yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, dokumentasi menjadi data pendukung dalam penggalian informasi yang diperoleh melalui informan.

Menurut Hasan (2002), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui

dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data juga merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis, yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.

- a. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.
- b. Penyajian Data, yaitu penulis menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif yang diperoleh melalui data observasi, wawancara dan dokumentasi
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu penulis membuat kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah di peroleh dilapangan dan teruji.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu 2020																			
		November-Desember				Januari-Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Penelitian Lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi Skripsi																				
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian, penulis membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, penelitian terdahulu, kerangka pikiran, konsep operasional, dan operasional variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, teknik penarikan informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan, dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang deskripsi data dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Undang-Undang No,or 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) kabupaten/kota di provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan operasional Pemerintah Daerah pada 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan. Pada awal terbentuk, Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924,94 Km² dengan 4 kecamatan, yaitu: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunur, dan Kuala Kampar.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah NOMOR 10 Tahun 2001, Kabupaten Pelalawan terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan kecamatan pemekaran yaitu: Pangkalan Kerinci, Ukui, Pangkalan Lesung, Pelalawan, Kerumutan dan Teluk Meranti.dan yang terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005, Kabupaten Pelalawan kembali dimekarkan menjadi 12 kecamatan, dengan kecamatan pemekaran yaitu: Bandar Petalangan dan Bandar Seikijang.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, yang meliputi 106 desa dan 12 kelurahan. Dimana 12 kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan

Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, dan Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H. T Azmun Ja'afar dan H. Anas Badrun. Selanjutnya, pada Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah pertama kali secara langsung dan terpilihlah pasangan H. T Azmun Ja'afar sebagai Bupati dengan wakilnya Drs, H. Rustan Efendi periode 2006-2012. Pemilukada tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2012 dan terpilihlah H. M. Harris sebagai Bupati dan Marwan Ibrahim sebagai wakilnya. Dan periode ketiga pada tahun 2016, H. M. Harris kembali terpilih menjadi Bupati dengan wakilnya Zarwedan.

2. Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir pantai timur pulau Sumatera antara 1,25° Lintang Utara sampai 0,20° Lintang Selatan dan antara 100,42° Bujur Timur sampai 103,28° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai apit, dan Kecamatan Siak); Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi Timur);

Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Peranap, dan Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)

Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Luas Kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dimana Kecamatan Teluk Meranti memiliki wilayah terluas yaitu 423.983 Ha (30,45 % dari Kabupaten Pelalawan) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha (1,39 % dari kabupaten Pelalawan).

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 adalah sebanyak 483.62 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 247.994 jiwa dan perempuan sebanyak 235.628 ribu jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak di Pangkalan Kerinci yaitu 144.9 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.7 jiwa. Kepadatan penduduk

menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Secara umum tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 28 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 532 jiwa per km². Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti yaitu 4 jiwa per km².

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Rasio Jumlah Kelamin
1	Langgam	18.000	16.927	34,9	1,1
2	Pangkalan Kerinci	73.883	71.032	144,9	1,0
3	Bandar Seikijang	23.510	21.980	45,5	1,1
4	Pangkalan Kuras	33.457	31.913	65,4	1,1
5	Ukui	22.054	20.056	42,1	1,1
6	Pangkalan Lesung	17.781	26.631	34,4	1,1
7	Bunut	8.589	8.496	17,1	1,0
8	Pelalawan	11.171	10.220	21,4	1,1
9	Bandar Petalangan	7.330	7.316	14,7	1,0
10	Kuala Kampar	9.310	8.961	18,3	1,0
11	Kerumutan	13.433	12.899	26,3	1,0
12	Teluk Meranti	9.478	9.224	18,7	1,0
Total		247.994	235.628	438,6	1,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2019

3. Letak Wilayah Dan Geografis Kecamatan Bunut

Kecamatan Bunut adalah salah satu kecamatan induk pembentuk Kabupaten Pelalawan, yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. Sedangkan letak wilayahnya adalah berada pada $0,298^{\circ}$ Lintang Selatan, dan pada $102,1497^{\circ}$ Bujur Timur. Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Sungai Buluh yaitu $78,93 \text{ Km}^2$, sedangkan desa Keriung merupakan desa terkecil dengan luas $27,45 \text{ Km}^2$.

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Desa (Km^2)	Kepadatan (Jiwa/ Km^2)
1	Merbau	1.182	9,05	34
2	Petani	1.159	8,06	37
3	Pangkalan Bunut	1.921	10,11	49
4	Lubuk Mas	761	7,37	27
5	Balam Merah	1.872	12,07	40
6	Bagan Laguh	1.688	10,53	42
7	Sungai Buluh	4.814	20,55	61
8	Lubuk Mandian Gajah	724	7,71	24
9	Keriung	482	7,15	18
10	Sialang Kayu Batu	1.888	7,40	66
Bunut		16.496	100,00	43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawa, 2020

4. Luas Dan Batas Wilayah Desa Sialang kayu Batu

Desa Sialang kayu Batu memiliki luas wilayah sebesar 32 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lubuk Mandian Gajah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sialang Bungkok
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lubuk Keranji Timur
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Balam Merah

Desa Sialang Kayu Batu merupakan daerah berlahan gambut yang bagus untuk dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dan aksia dengan beberapa perusahaan yang ada dengan mayoritas pekerjaan penduduk adalah Petani.

5. Visi dan Misi Desa Sialang Kayu Batu

Visi : “Terwujudnya masyarakat desa Sialang Kayu Batu yang mandiri, sejahtera, sehat, aman, berpengetahuan dan terampil yang menjunjung tinggi kebersamaan”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi desa
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip kemandirian dan partisipasi masyarakat
3. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana masyarakat

6. Struktur Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu

Adapun Struktur Pemerintahan Desa Sialang Kayu Batu adalah sebagai berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu, 2021

B. Keadaan Penduduk Desa Sialang Kayu batu

Desa Sialang Kayu Batu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan . Desa Sialang Kayu Batu dimekarkan pada tahun 2005 dengan luas wilayah sebesar 32 Km² ysng terletsk sekitar 122 Km dar kota Pekanbaru. Saat ini Desa Sialang Kayu Batu memiliki penduduk sebanyak 1.478 jiwa, yang terdiri laki-laki berjumlah 765 jiwa, dan perempuan sebanyak 713 jiwa.

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No	Umur	Jumlah (JIwa)	Persentase
1	0-5 tahun	108 jiwa	13,7 %
2	6-12 tahun	109 jiwa	13,6 %
3	13-25 tahun	203 jiwa	7,30 %
4	26-55 tahun	731 jiwa	20,2 %
5	56 tahun keatas	113 jiwa	13,1 %
Jumlah		1.478 jiwa	100 %

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu, 2020

1. Tingkat Pendapatan Dan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Desa Sialang Kayu Batu dominan adalah Karyawan Swasta, Petani, Wiraswasta, dan lain lain. Mata pencaharian masyarakat terbanyak yaitu sebagai Karyawan Swasta yaitu sebanyak 556 jiwa. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel IV.4 : Mata Pencaharian Masyarakat desa Sialang Kayu batu

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Swasta	556 jiwa	65,5 %
2	Wiraswasta	125 jiwa	15 %
3	Petani	160 jiwa	19 %
4	PNS	4 jiwa	0,5 %
Total		845 %	100 %

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu, 2020

Suatu masyarakat dikaitkan dengan pendapatan dan mata pencaharian, dimana masyarakat desa Sialang Kayu Batu mayoritas bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit yang bernama PT. SERIKAT PUTRA sehingga banyak masyarakat yang dalam lingkup kehidupannya bertempat tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit dibawah naungan PT. SERIKAT PUTRA itu sendiri. Kemudian sisanya memiliki mata pencaharian sebagai petani baik kelapa sawit ataupun karet yang memang merupakan komoditas utama Desa Sialang Kayu batu.

2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik pula kualitas SDM di wilayah tersebut. Kualitas pendidikan akan memiliki peluang dan kemampuan dalam usaha mengembangkan wilayahnya dan akan memberikan penghasilan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikan dan mata pencahariannya.

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga merupakan kontribusi yang sangat besar terhadap kemauan suatu kehidupan ekonomi masyarakat dan kesatuan pembangunan masyarakat dalam suatu daerah.

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah/buta huruf	178 jiwa	15 %
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	273 jiwa	22 %
3	Tamat Sekolah Dasar	437 jiwa	36 %
4	Tamat Sekolah Menengah Pertama	187 jiwa	15 %
5	Tamat Sekolah Menengah Umum/Kejuruan	132 jiwa	11 %
6	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	21 jiwa	1 %
Total		1.228 jiwa	100 %

Sumber : Kantor Desa Sialang Kayu Batu, 2020

C. Gambaran Umum Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

1. Sejarah Singkat Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

Perpustakaan Sialang Cerdas Desa Sialang Kayu Batu berdiri tahun 2017 dimasa jabatan PJS kepala desa Bpk. Syafaruddin . Pada saat itu ada tawaran dari kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan buku bahan pustaka sejumlah 1091 eksemplar. Sehubungan dengan tempat dibalai desa Sialang Kayu Batu ruangnya terbatas maka

Kepala Desa mengambil kebijaksanaan untuk menempatkan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu di ruang tamu kantor kepala desa Sialang Kayu Batu, yang terletak 100 meter sebelah timur balai desa Sialang Kayu Batu sampai sekarang menjelang pembangunan Perpustakaan desa. Seiring dengan itu telah diterbitkan SK Kepala Desa Sialang Kayu Batu N0. 141/sk-pd/skb/2017/ Tahun 2017 tentang pendirian Perpustakaan Sialang Cerdas Desa Sialang Kayu Batu dan tentang pengangkatan petugas pengelola perpustakaan Sialang Cerdas Desa Sialang Kayu Batu. Jumlah koleksi sampai saat ini Masih 1091 eksemplar. Dengan pengelola 3orang. Satu koordinator, satu tenaga administrasi, dan satu tenaga teknis. Jam buka layanan setiap hari mulai jam 09.00 sampai jam 15.00 WIB.

2. Visi dan Misi Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

Visi :

“Terwujudnya Perpustakaan Sialang Cerdas Desa Sialang Kayu Batu sebagai pelayanan masyarakat dalam meningkatkan minat baca dan budaya tulis dengan sasaran mendukung pendidikan nonformal dan informal serta masyarakat pada umumnya.”

Misi :

1. Meningkatkan masyarakat yang gemar membaca
2. Mengupayakan terwujudnya tempat yang represif bagi masyarakat Sialang Kayu Batu dan sekitarnya dalam memperoleh informasi baik yang berupa buku bacaan maupun browsing melalui internet.

3. Meningkatkan kinerja perpustakaan Sialang Cerdas dengan upaya melengkapi sumber bahan pustaka yang update baik yang berupa buk maupun bahan bacaan yang tersedia dalam website perpustakaan Sialang Cerdas.

3. Struktur Organisasi Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

Tabel IV.6: Susunan Jabatan Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

No.	Nama	Jabatan
1	Sewi	Penanggung Jawab
2	Busro	Ketua
3	Aan Abdul N.	Sekretaris
4	Yunyarlis	Bendahara
5	Vivi Harianti	Seksi Pengadaan dan Pengelolaan
6	Sri Anggi	Seksi Pelayanan

Sumber: Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, 2021

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa Bapak Sewi sebagai Kepala Desa Sialang Kayu Batu sekaligus penanggung jawab terhadap perpustakaan desa. Bapak Busro sebagai ketua perpustakaan desa, Bapak Aan Abdul N sebagai sekretaris, Ibu Yunyarlis sebagai bendahara, Ibu Vivi Harianti sebagai seksi pengadaan dan pengelolaan, serta Ibu Sri Anggi sebagai seksi pelayanan

4. Pemustaka Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

Table IV.7 : Daftar Pemustaka Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

No	Pemustaka	Jumlah	Keterangan
1	SD	72	-
2	SMP	50	-
3	SMA	20	-
4	Dewasa	170	-
Jumlah		312	-

Sumber : Peepustakaan Desa Sialang Kayu Batu, 2021

Anggota perpustakaan desa Sialang kayu batu sampai saat ini berjumlah 312 orang. Mayoritas adalah warga Desa Sialang Kayu Batu sebanyak 70 %, sedangkan 30 % lainnya adalah diuar Desa Sialang Kayu Batu yaitu desa Lubuk Mandian gajah dan desa Balam Merah

5. Layanan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu

- a. Layanan Sirkulasi (pinjam-kembali koleksi perpustakaan) dan baca ditempat
- b. Layanan Referensi dan Rujukan
- c. Layanan Informasi melalui Handphone dan SMS

6. Kerjasama Desa Sialang Kayu Batu

Untuk menunjang terwujudnya visi dan misi perpustakaan perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang mendukung. Dalam hal ini perpustakaan Sialang Cerdas melakukan kerjasama dengan:

- a. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Kerjasama dengan PAUD terdekat ditujukan untuk membangun minat baca sejak dini. Dengan tumbuhnya minat baca sejak kecil diharapkan terbentuk budaya membaca dalam masyarakat Sialang Kayu Batu. Dengan demikian perpustakaan Sialang Cerdas tak akan sepi peminat dan akan tetap diakui keberadaannya serta dibutuhkan oleh masyarakat Sialang Kayu Batu.

b. Kerjasama dengan sekolah yang ada di Desa Sialang Kayu Batu

Kerjasama dengan sekolah disekitar perpustakaan Sialang Cerdas desa Sialang Kayu Batu tidak hanya dalam hal pelayanan saja akan tetapi juga pada kegiatan yang menjadi program desa. Misalnya saja kerjasama dalam penjangkaran peserta lomba cerdas cermat, perpustakaan bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menunjang suksesnya acara tersebut.

7. Anggaran

Penganggaran secara rutin baru akan direncanakan pada tahun 2019,, namun alokasi anggaran untuk perpustakaan tidak tetap. Besarnya anggaran tersebut adalah Rp. 5.000.000,- dari APBD untuk perpustakaan yang dialokasikan untuk pengembangan koleksi 30%, penyelenggaraan jasa/layanan perpustakaan 50%, dan pengeluaran lainnya 20%. Sumber anggaran lainnya hasil usaha mandiri. Bentuk usaha ini adalah penjualan pulsa, dan juga berasal dari APBD yang diberikan melalui kantor KPA Pelalawan berupa insentif bagi pengelola perpustakaan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah informan yang diteliti. Untuk mengetahui identitas dari informan yang penulis temui dilapangan, dapat dilihat pada tabel pembahasan dibawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	Sewi, Amd	L	43	D III	Kepala Desa Sialang Kayu Batu
2	Yunyarlis	P	42	S1	Pengelola/pengurus perpustakaan
3	Sori Muda Pohan	L	29	SMA	Masyarakat
4	Meliyanti	P	22	S1	Pelajar
5	Dimas	L	17	SMP	Pelajar
6	Ivan	L	16	SMP	Pelajar

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas,yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah bapak Sewi, Amd. selaku Kepala Desa Sialang Kayu Batu. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ibu Yunyarlis selaku pengelola/pengurus perpustakaan desa Sialang Kayu batu, Bapak Sori Muda Pohan selaku tokoh masyarakat dan 3 orang pelajar/siswa yang tinggal di Desa Sialang Kayu Batu.

Dengan satu key informan dan beberapa informan yang telah disebutkan diatas, Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai key informan dianggap mampu oleh peneliti dalam memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai indicator yang digunakan. Kemudian pengelola/pengurus perpustakaan desa serta empat informan yang telah disebutkan juga merupakan hal penting dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini karena pengelolaan perpustakaan desa ini merupakan hal yang telah diketahui oleh informan.

B. Hasil Penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat pedesaan dengan membangun komunikasi intensif dalam upaya meningkatkan minat baca secara menyeluruh dan tingkat usia. Dengan demikian Pemerintah Desa dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”

melalui pembangunan perpustakaan di desa. Dengan kaitan inilah perpustakaan desa dan pelayanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan desa merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan masyarakat. Berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan, Penganggaran dan Penyelenggaraan.

Pada hakikatnya, perpustakaan desa memiliki peran yang strategis untuk masyarakat desa dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai adanya perpustakaan desa untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sebagai penyedia sumber informasi yang cepat, tepat, lengkap serta murah sebagai salah satu program wajib belajar untuk menunjang keterampilan masyarakat. Fungsi utama dari perpustakaan desa adalah untuk menyediakan layanan memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan perpustakaan desa. Berikut peran yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) menyatakan bahwa motivator merupakan pemerintah desa sebagai pendorong, perangsang, pengaruh, dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat dari satu individu ke individu lainnya dengan

berbagai cara, agar ikut melakukan tindakan-tindakan atau agar ikut melaksanakan sesuatu yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pelatihan-pelatihan atau lazim disebut Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintah desa/kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Dalam hal ini Seorang Kepala Desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya agar berperan aktif dalam pembangunan perpustakaan desa serta meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana Kepala Desa memenuhi peran tersebut, dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sialang Kayu Batu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Pemerintah desa kita mempunyai cita-cita tinggi bagaimana kita memajukan masyarakat untuk membudayakan minat baca pada ruanglingkup pedesaan. Saya sebagai Kepala Desa mempunyai peran dalam memotivasi masyarakat untuk dapat memanfaatkan perpustakaan dengan sebagaimana semestinya. Dalam hal ini, pemerintah desa melakukan pelatihan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar

masyarakat mengetahui fungsi sebenarnya dari perpustakaan tersebut. Pemerintah desa juga sebagai penyedia sarana dan prasarana yang baik sebagai penunjang untuk mengikat daya tarik masyarakat.” (Kantor Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu :

“Pemerintah desa dalam hal ini sudah sangat berperan karena sudah banyak melaukakan banyak sosialisai kepada masyarakat mengenai pentingnya perpustakaan desa itu sendiri. Dan mereka juga sudah menyediakan beberapa bahan koleksi yang dapat memicu daya tarik masyarakat khususnya siswa/pelajar untuk datang dan membaca di perpustakaan.” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Hal tersebut juga di perkuat dengan pernyataan Sori Muda Pohan selaku masyarakat desa Sialang kayu Batu :

“Saya sangat mendukung adanya perpustakaan desa di lingkungan pedesaan seperti ini. Namun sosialisai yang dilakukan oleh Kepala Desa masih minim, karena saya sebagai orang tua dan orang tua yang lain juga membutuhkan pengetahuan bagaimana perpustakaan itu berjalan dan dapat memberikan manfaat apa saja kepada orang yang berkunjung

khususnya untuk pelajar” (Desa Sialang Kayu Batu, Senin, 5 April 2021, Pukul: 09.00 WIB)

Selain melakukan pealtihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala Desa Sialang Kayu Batu juga melakukan kunjungan langsung ke Perpustakaan Desa. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu :

“Setelah kami melakukan sosialisasi kepada msayarakat, sedikit banyak sudah ada yang langsung dating ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku khususnya para siswa. Dengan begitu saya memnfaatkan keadaan ini untuk lebih memberikan mereka pengarahan agar mereka dapat memanfaatkan perpustakaan ini dengan baik.” (Kantor Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yuniarlis selaku pengurus/pengelola Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu :

“Dalam hal ini Kepala Desa cukup sering mendatangi perpustakaan apalagi ketika ada anak-anak atau pelajar di dalam. Beliau memberikan pengarahan seperti mengajak para siswa untuk dapat menggunakan perpustakaan ini seprti jika adantugas sekolah atau semacamnya” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Meliyanti selaku siswa/masyarakat Desa Sialang Kayu Batu :

“pernah waktu saya dan teman-teman lagi baca buku di perpustakaan, saya di datangi oleh Kepala Desa. Kemudian pak Kades menjelaskan beberapa hal seperti jenis-jenis buku yang ada di perpustakaan. Beliau juga mengatakan untuk terus menggunakan perpustakaan ini dalam berbagai kepentingan” (Desa Sialang Kayu Batu, Senin, 5 April 2021, Pukul: 16.00 WIB)

Menurut hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu sebagai motivator belum sepenuhnya berperan karena masih minim nya sosialisasi dan kunjungan yang dilakukakn kepada para orang tua mengenai pentingnya perpustakaan desa.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Jumat 09 April 2021 di Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa kurang efisien dalam memberikan arahan atau motivasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perpustakaan desa bagi masyarakat desa Sialang Kayu Batu. Hal ini dilihat dari kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kepala Desa kepada masyarakat terkhusus kepada orang tua yang memiliki anak yang masih duduk di bangku sekolah. Dengan adanya sosialisasi dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat

serta menyediakan sarana dan prasarana yang sangat baik dapat membantu masyarakat memanfaatkan perpustakaan desa di desa Sialang Kayu batu.

Tabel V.2: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Motivator

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pemerintah Desa sebagai Motivator dalam pengelolaan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu
2.	Waktu kegiatan	Jumat, 09 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu
4.	Peserta yang diamati	Pengurus/pengelola Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu
5.	Hasil observasi	Sosialisasi serta kunjungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sialang kayu Batu dianggap masih kurang efektif karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya perpustakaan desa untuk meningkatkan pendidikan masyarakat desa khususnya masyarakat yang masih duduk di bangku sekolah. Dengan adanya sosialisasi dan kunjungan-kunjungan yang dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana yang sangat baik dapat membantu masyarakat memanfaatkan perpustakaan desa di desa Sialang Kayu batu.

Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 2021

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Pemerintah desa dalam hal ini bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan pendidikan, serta meningkatkan keterampilan. Fasilitator merupakan

seseorang yang memeberikan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok.

Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa menjalankan peran sebagai fasilitator, dalam hal ini Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu menyediakan sarana dan prasarana yang baik. Berikut penjelasan dari Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Fasilitas yang ada pada perpustakaan kita sudah lengkap, peperti buku dan rak-rak buku juga sudah memadai. Perpustakaan kita juga sudah di lengkapi dengan akses Wifi, dengan begitu masyarakat khususnya pelajar dapat mengakses apapun yang dibutuhkan jika apa yang dicari tidak ada di dalam perpustakaan.” (Kantor Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu, sebagai berikt :

“Pemerintah desa sudah sangat berperan dalam memfasilitasi semua perlengkapan yang dibutuhkan di dalam perpustakaan ini. Dalam masa pandemic saat ini pun perpustakaan masih tetap dibuka dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya pandemi ini, pemerintah desa menyediakan tempat cuci tangan tepat di depan pintu masuk perpustakaan dan pengecekan suhu badan. Namun, tidak ada penambahan koleksi buku dari tahun 2020 menyebabkan kurangnya minat baca masyarakat pada perpustakaan” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Ivan selaku masyarakat/pelajar di Desa Sialang Kayu batu, sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana di perpustakaan sudah lengkap. Apalagi dengan adanya wifi itu sangat membantu kami sebagai pelajar jika ada tugas-tugas sekolah. Selama pandemi ini pun kami memanfaatkan perpustakaan untuk belajar daring, wifi di perpustakaan menurut saya sangat membantu.” (Kantor Kepala Desa, Senin, 5April 2021, Pukul: 11.30 WIB)

Selain itu, Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu menjadi narasumber yang baik kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan Pemerintah Desa berperan

sebagai fasilitator. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu:

“Pemanfaatan fasilitas-fasilitas perpustakaan tetap dalam pantauan pengelolal perpustakaan. saya sebagai kepala desa selalu menyikapi dengan baik apabila ada masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas perpustakaan selagi itu demi kepentingan mereka. Kami selalu memberikan arahan kepada masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu” (Kantor Kepala desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal ini diperkuat oleh penjelasan Yuniarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu :

“Saya selalu update untuk segala fasilitas yang ada di perpustakaan. jika ada yang kurang atau yang perlu di tambah, saya selalu memberikan laporan kepada Kepala Desa, dan beliau selalu merespon dengan baik.” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Hal ini juga diperkuat oleh Dimas selaku siswa/masyarakat Desa Sialang Kayu Batu:

“Saya sebagai pelajar sangat senang dengan adanya perpustakaan ini. Dan fasilitas yang ada sudah cukup lengkap dan dalam kondisi yang baik. Karena gedung perpustakaan dengan kantor Kepala Desa itu

bersebelahan, bapak Kepala Desa pernah bilang untuk tidak sungkan bertanya kepada siapapun yang ada disana.” (Desa Sialang Kayu Batu, Senin, 5 April 2021, Pukul: 14.00 WIB)

Menurut hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dengan sub indikator sebagai fasilitator sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang di sediakan oleh Pemerintah Desa. Manfaat ini sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Sialang Kayu Batu khususnya pelajar yang mengunjungi perpustakaan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Jumat 09 April 2021 di Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah desa sudah memberikan fasilitas yang memadai dan sarana prasarana seperti internet wifi termasuk bagian dari pustaka. Serta Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu juga mampu menjadi narasumber yang baik kepada masyarakat dengan selalu memberikan pelayanan dan respon yang baik. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa “Peran Fasilistor” pemerintah desa sepenuhnya berhasil karena masyarakat dengan udah mencari referensi di perpustakaan desa dan juga menggunakan sarana Internet yang disediakan di perpustakaan desa Sialang Kayu Batu.

Tabel V.3: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Fasilitator

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam pengelolaan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu
2.	Waktu kegiatan	Jumat, 09 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu
4.	Peserta yang diamati	Pengurus/pengelola Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu
5.	Hasil observasi	Informasi yang diperoleh bahwa Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu dianggap mampu menjadi narasumber yang baik, hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah Desa yang sudah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai, serta memberikan pelayanan dan respon yang baik kepada masyarakat.

Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 2021

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Mobilisator

Peran Mobilisator merupakan peran pemerintah desa dalam mendukung dan mendorong minat baca kepada masyarakat untuk mengarahkan dan melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan di desa untuk kepentingan bersama.

Bintori Tjokroamidjojo (2000:42) menyatakan bahwa Yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu Kepala Desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa

yang berguna untuk kepentingan bersama, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Untuk melihat peran Pemerintah Desa sebagai mobilisator, Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu mendirikan gedung yang baik khusus untuk perpustakaan agar masyarakat nyaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Berikut penjelasan dari Kepala Desa Sialang Kayu Batu :

“Perpustakaan ini didirikan sejak tahun 2017, namun pada saat itu belum ada bangunan atau ruangan khusus untuk menempatkan perpustakaan. maka dari itu, perpustakaan di letakkan di dalam Kantor Kepala Desa tepat di lobi depan kantor. Sehingga apabila masyarakat ingin menggunakan perpustakaan pada saat itu tidak mesti masuk ke dalam kantor terlalu dalam. Pada tahun 2019, dengan bantuan dana desa berdirilah satu bangunan untuk perpustakaan desa tepat di depan samping Kantor Kepala Desa Sialang Kayu Batu.” (Kantor Kepala Desa, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa:

“Pemerintah Desa pada tahun 2019 sudah mendirikan satu bangunan khusus untuk perpustakaan dimana pada awal dibentuknya perpustakaan pada tahun 2017 lalu, buku-buku dan fasilitas lainnya di letakkan di

dalam Kantor Kepala Desa. Saat ini, dengan adanya bangunan khusus untuk perpustakaan itu lebih memudahkan masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan.” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Hal tersebut juga di perkuat dengan pernyataan Meliyanti selaku masyarakat/pelajar di desa Saialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Kalau waktu awal-awal didirikannya perpustakaan ini, kami membaca buku didalam Kantor Kepala Desa, sehingga membuat kami enggan atau segan membaca buku. Tetapi sekarang sudah ada bangunan untuk perpustakaan sendiri, sehingga kami lebih nyaman dan leluasa dalam memanfaatkan fasilitas yang ada pada perpustakaan tersebut.” (Desa Sialang Kayu Batu, Senin, 5 April 2021, Pukul: 16.00 WIB)

Seain itu untuk meningkatkan minat baca msyarakat. Pemerintah Desa juga melakukan penambahan koleksi buku berdasarkan hasil laporan dari pengelolal perpustakaan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu :

“Sejak tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku dikarenakan keadaan yang pandemi ini tidak banyak orang yang dating untuk memanfaatkan perpustakaan. Tetapi kami selalu melakukan perawatan

untuk koleksi buku-buku yang ada” (Kantor Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yuniarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Batu Batu :

“Seajuh ini selama pandemi belum ada penambahan koleksi buku. Tetapi dengan adanya jaringan wifi di sini itu sudah sangat membantu masyarakat apabila tidak menemukan koleksi buku pada perpustakaan. artinya mereka bisa mencari referensi yang lain di internet.”

(Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul:3.30)

Hal ini juga di perkuat oleh Meliyanti selaku siswa/masyarakat Desa Sialang Kayu Batu:

“Menurut saya, kurangnya koleksi buku di perpustakaan merupakan masalah yang harus jadi perhatian pemerintah desa. Karena walaupun menggunakan wifi di perpustakaan pun tidak selamanya berjalan dengan mulus. Wifi di sana terkadang masih mengalami gangguan jaringan, belum lagi kalau listrik padam. Jadi menurut saya penambahan koleksi buku itu perlu berdasarkan keluhan masyarakat, misalnya mereka lagi membutuhkan buku tentang apa.” (Desa Sialang Kayu Batu, Senin, 5April 2021, Pukul: 16.00 WIB)

Menurut hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah efektif dalam menjalankan perannya sebagai Mobilisator. Pemerintah Desa mampu menyiapkan gedung baru khusus untuk kepentingan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada hari Jumat 2021 di Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, peran Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu sebagai mobilisator sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya pembangunan gedung baru untuk perpustakaan pada tahun 2019 memikat daya tarik masyarakat untuk menggunakan perpustakaan. Tetapi tidak ada penambahan lagi untuk koleksi dan bahan-bahan bacaan pada perpustakaan juga harus menjadi perhatian yang lebih dari Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu, karena buku juga merupakan sarana yang penting untuk menunjang bahan bacaan yang ada di Perpustakaan. Karena masih terjadi kendala yang dialami pengunjung apabila sedang menggunakan wifi pada perpustakaan, seperti gangguan jaringan dan pemadaman listrik.

Tabel V.4: Hasil Rekap Observasi Terkait Indikator Mobilisator

No.	Uraian	Keterangan
1.	Objek yang diamati	Pemerintah Desa sebagai Mobilisator dalam pengelolaan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu
2.	Waktu kegiatan	Jumat, 09 April 2021
3.	Tempat pengamatan	Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu
4.	Peserta yang diamati	Pengurus/pengelola Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu
5.	Hasil observasi	Informasi yang diperoleh bahwa Pemerintah

	<p>Desa Sialang Kayu Batu dianggap mampu mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan perpustakaan desa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya Pemerintah Desa Pada tahun 2019 dengan menyediakan bangunan khusus untuk perpustakaan, sehingga masyarakat merasa nyaman saat menggunakan perpustakaan. Tetapi masih ada persoalan yang harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu yaitu tidak pernah terjadi penambahan koleksi buku lagi pada perpustakaan desa Sialang Kayu Batu, dimana penambahan koleksi buku ini dapat menunjang bahan bacaan yang ada pada perpustakaan.</p>
--	--

Sumber : Hasil Observasi Peneliti, 2021

C. Penerapan Standar Nasional Dalam Pengelolaan Perpustakaan Desa

Pengelolaan adalah salah satu inti dari tugas perpustakaan, bahan yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses memperoleh informasi nantinya berjalan lancar dan mewujudkan tertib administrasi, dalam hal pelaksanaan proses pengelolaan pustaka berbeda-beda urutan kegiatan. Pengelolaan secara profesional berarti memenuhi kriteria dan standar yang berlaku baik dari sisi perpustakaan maupun tenaga pengelolanya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Peran Pemerintah Desa sangat besar dalam pengelolaan perpustakaan mengikuti Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Nasional Perpustakaan. terutama tersedianya bahan

kolesi buku-buku yang menjadi referensi bagi masyarakat pada umumnya dan pelajar pada khususnya. Desa kita satu-satunya desa yang mendirikan perpustakaan desa di Kecamatan Bunut, sehingga itu menjadi acuan penting dalam penerapan Standar Nasional Perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan.” (Kantor Kepala desa Sialang Kayu BatuRabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Dalam pengelolaan perpustakaan desa sudah sesuai dengan standar nasional yang diterapkan oleh kepala perpustakaan desa/kelurahan yang meliputi koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bahwasannya fasilitas sarana dan prasarana telah disediakan oleh pemerintah desa, dalam bentuk koleksi-koleksi buku. Dalam pengelolaannya sama seperti perpustakaan lainnya, buka dari pagi sampai siang dengan melalui proses pendaftaran. Serta proses administrasi peminjaman harus ditulis kapan dipinjam dan kapan dikembalikan.” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dimas selaku masyarakat/pelajar di desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Pengelolaan pada perpustakaan menurut saya sudah dapat dikatakan baik, karena ketika saya berkunjung ke perpustakaan akan dilakukan proses pendaftaran. Jika saya ingin meminjam buku pun harus melalui proses administrasi dan menerapkan sanksi apabila buku tidak dapat dikembalikan lagi. Namun masih kurangnya koleksi buku yang kadang saya butuhkan, ini letak penting adanya akses wifi di dalam perpustakaan.” (Desa Sialang Kayu Batu, Senin, 5 April 2021, Pukul: 14.00)

Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaa, Pengawasan, Pelaporan dan Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

1. Perencanaan Perpustakaan Desa

Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus dikerjakan seperti perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik dan fungsi tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan, dan perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan. Perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Berikut penjelasan dari Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Perpustakaan di desa Sialang Kayu Batu merupakan satu-satunya perpustakaan yang berdiri di Kecamatan Bunut. Perpustakaan ini didirikan paa tahun 2014, namun masih menggunakan Kantor Kepala Desa sebagai tempat sementara perpustakaan. Tetapi dengan begitu masyarakat sudah mengetahui tentang keberadaan perpustakaan ini. Dengan adanya dana desa yang tersedia, pemerintah desa menafaatkan dana tersebut untuk membangun bangunan perpustakaan serta melengkapi fasilitas.” (Kantor Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu :

“Dalam hal perencanaan perpustakaan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu, tetapi saya selaku pengurus/pengelola mendapat hak suara jika ada masukan yang baik untuk keperluan perencanaan perpustakaan, sehingga pemerintah desa denga pengurus perpustakaan berjalan berdampingan dalam hal perencanaan perpustakaan” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Dengan demikian, dalam hal perencanaan itu adalah kewenangan pemerintah desa, namun pengelola/pengurus perpustakaan mendapatkan hak suara dalam mengatur perencanaan. Serta mengikuti Peraturan Kepala Perpustakaan Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan desa Sialang Kayu Batu.

2. Pelaksanaan Perpustakaan Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel serta dalam pelaksanaan ini memiliki prosedur yang baku. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sialang Kayu batu sebagai berikut :

“Kurangnya bahan koleksi yang terdapat pada perpustakaan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perpustakaan hingga saat ini. Karena dalam hal pelaksanaan ini sangat tidak mudah, maka dari itu dibutuhkan inisiatif lain dari luar desa guna kepentingan perpustakaan dengan tetap mengikuti peraturan kepala perpustakaan.” (Kantor Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Memang benar, dalam hal pelaksanaan ini tidak mudah, tapi kami sebagai pengurus tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang mengunjungi perpustakaan. denagn memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia.” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Dengan demikian, proses Pelaksanaan Perpustakaan Desa sudah sesuai penerapan yang telah diamanatkan oleh Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan. Walaupun masih ada kendala yang disebabkan oleh bahan koleksi yang kurang, sehingga menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat.

3. Pengawasan Perpustakaan Desa

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi dan pelaporan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efiseinsi, efektivitas dan akuntabilitas perpustakaan. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Saya selaku Kepala Desa memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengawasan dengan melihat bagaimana kondisi didalam perpustakaan terlebih dahulu, kemudian melihat bagaimana pengurus memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Termasuk penambahan bahan-bahan koleksi pada perpustakaan desa.” (Kantor Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu batu sebagai berikut :

“Menurut saya, pengawasan memang tanggung jawab penuh pemerintah desa. Dan pemerintah desa sudah sangat memperhatikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan di dala perpustakaan. kami sebagai pengutus juga selalu dievaluasi oleh Kepala Desa.” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Dengan demikian, pemerintah desa sudah melakukan pengawasan perpustakaan desa dengan baik dengan cara selalu memperhatikan kondisi perpustakaan secara langsung dan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus perpustakaan.

4. Pelaporan Perpustakaan Desa

Pelaporan merupakan suatu hal yang dilaporkan terhadap pelaksanaan tugas perpustakaan itu sendiri, pelaporan dilakukan oleh pengurus perpustakaan secara berkala yang disampaikan kepada pemerintah desa. Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja. Berdasarkan hasil wawancara penelitan dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Dalam hal pelaporan ini, memang yang sangat sering dilaporkan oleh pengurus/pengelola perpustakaan ada lah kurangnya koleksi buku yang menarik. Sehingga menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat. Terkadang juga ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa masyarakat tidak menggunakan fasilitas perpustakaan dengan sebagai mana mestinya, contohnya akses wifi yang bnayak digunakan masyarakat untuk diluar kepentingan belajar seperti menonton video dan bermain game” (Kantor Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal ini diperkuat dengan dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Yang sering kami laporkan kepada pemerintah desa itu adalah bahan koleksi buku yang kurang, karena bahan koleksi yang baru ini sangat penting untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan itu akan dievaluasi bersama” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Dengan demikian, dalam hal pelaporan perpustakaan desa itu sendiri dilaporkan kepada pemerintah desa melalui pengurus/pengelola perpustakaan dan akan dievaluasibersama untuk perpustakaan desa yang lebih baik.

5. Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan Desa

Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan desa adalah anggaran yang digunakan untuk perlengkapan bahan-bahan perpustakaan, buku-buku dan koleksi bahan lainnya. Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan. Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukkan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan dan tenaga perpustakaan. Anggaran perpustakaan desa bersumber dari anggaran desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan desa berasal dari Dana Desa. Tetapi kita tidak hanya fokus dalam pembangunannya saja, tetapi anggaran tersebut juga untuk memenuhi kelengkapan didalam perpustakaan seperti buku-buku. Dana Desa yang dicairkan secara rutin sebesar Rp. 5000.000 dengan pembagian untuk pengembangan koleksi sebesar 30%, penyelenggaraan jasa/layanan perpustakaan 50% dan pengeluaran lainnya 20%. Pada Desember tahun 2021 nanti akan diadakan pengajuan penganggaran ke pusat. Dalam pengajuan inilah akan tercatat apa saja keperluan yang dibutuhkan pada perpustakaan”

(Kantor Kepala Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 10.00 WIB)

Hal ini di perkuat dengan pernyataan Yunyarlis selaku pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sebagai berikut :

“Penganggaran untuk perpustakaan bersumber dari Dana Desa. Kami selaku pengurus sangat berharap adanya pengadaan koleksi buku lagi pada pengajuan Dana Desa selanjutnya. Agar masalah kurangnya koleksi buku ini akan segera terselesaikan.” (Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu, Rabu, 31 Maret 2021, Pukul: 13.30 WIB)

Dengan demikian dalam hal penganggaran dan penyelenggaraan perpustakaan desa dimana penganggaran bersumber dari dana desa untuk kebutuhan sarana prasarana dan bahan koleksi perpustakaan desa. Peran Pemerintah Desa sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perpustakaan desa agar bisa seefektif mungkin dalam mengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sialang Kayu Batu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu sudah cukup berperan dalam pengelolaan perpustakaan desanya, hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah desa Sialang Kayu Batu sebagai motivator (menjadi pendorong, perangsang, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat guna meningkatkan minat baca masyarakat), sebagai fasilitator (Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu sudah memberikan fasilitas yang baik, serta adanya akses internet sangat memudahkan masyarakat mencari referensi lain diluar dari perpustakaan), serta sebagai mobilisator (Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi kepentingan perpustakaan)
2. Penerapan Standar Nasional pada Pengelolaan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu diukur dalam 5 tahapan, diantaranya :
 - a. Perencanaan (Perencanaan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sudah cukup baik),
 - b. Pelaksanaan (Pelaksanaan Perpustakaan Desa Sialang Kayu Batu sudah sesuai penerapan yang telah diamanatkan oleh Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan. Walaupun masih ada kendala yang disebabkan oleh bahan koleksi yang kurang, sehingga menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat),
 - c.

Pengawasan (Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap perpustakaan sudah cukup baik dengan cara selalu memperhatikan kondisi perpustakaan secara langsung dan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus perpustakaan), d. Pelaporan (Pelaporan yang dilakukan pada perpustakaan desa Sialang Kayu Batu sudah berjalan dengan baik, dimana pelaporan tersebut dilakukan oleh pengurus/pengelola perpustakaan yang disampaikan kepada Pemerintah Desa), e. Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan (Penyelenggaraan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu bersumber dari Dana Desa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan). (Djokroamidjijo, 2000)

B. Saran

Adapun saran dan masukan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengurus/pengelola perpustakaan desa Sialang Kayu Batu diharapkan perlukan untuk melakukan evaluasi dalam pengelolaan perpustakaan. Dimana masih banyak fasilitas serta sarana dan prasarana yang masih harus dilengkapi. Kurangnya jumlah koleksi buku di perpustakaan desa Sialang Kayu Batu perlu menjadi masalah utama bagi Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu, maka sangat perlu dilakukan penambahan jumlah koleksi buku di perpustakaan. Serta penambahan koleksi buku ini harus memperhatikan perbandingan kualitas dan kuantitas buku.

2. Penerapan Standar Nasional Perpustakaan desa Sialang Kayu Batu dalam hal perencanaan harus dapat ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Desa Sialang Kayu batu, bukan hanya sekedar menyerap suara dari pengurus/pengelola perpustakaan tetapi masyarakat juga berhak memberikan masukan guna dalam perencanaan perpustakaan. Kemudian pelaksanaan perpustakaan desa Sialang Kayu Batu juga harus terperinci dan lebih efektif. Untuk pengawasan perpustakaan harus lebih diperhatikan lagi agar pengawasan terhadap perpustakaan desa Sialang Kayu Batu lebih optimal. Mengenai pelaporan perpustakaan yang disampaikan kepada Pemerintah Desa melalui pengurus/pengelola perpustakaan harus lebih terperinci lagi, agar semua kekurangan-kekurangan yang tercatat dapat dilaporkan secara keseluruhan kepada Pemerintah Desa Sialang Kayu Batu. Dan yang terakhir mengenai penganggaran penyelenggaraan perpustakaan desa, dalam hal ini penulis mengharapkan Pemerintah Desa dapat mencari donatur dari berbagai pihak yang bersedia untuk perkembangan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal penambahan koleksi maupun perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan serta menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Afrizal, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bangun, E. (2014). *Analisis Perkembangan Desa Mburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo*. 2(1), 90–98.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karnal, Z. (2005). *Peningkatan Kelembagaan Pengembangan Budaya Baca Di Perpustakaan Merupakan Strategi Yang Efektif Untuk Menciptakan Kebiasaan Membaca Masyarakat Dan Bangsa*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Labolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud, M. (2001). *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moelong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology Jilid 1 Dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2011). *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, R. (2001). *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. Jakarta: Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP).
- Rasyid, R. (2002). *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2015). *Lemabaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sugyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

- Sugyono, P. D. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno. (2008). *Peranan Perpustakaan Desa Dalam Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, I. K. (2002). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian. (2003). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Jokroamidjojo, B. (2000). *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta: Rajawali.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal dan Skripsi

- Antasari, I. W. (2019). *Perpustakaan “SENENG MACA” sebagai sarana meningkatkan minat baca masyarakat*. 13(01), 1–12.
- Ariyani, L.P.S, Wayan M, Nengah B.A, D. M. . (2017). Pemberdayaan Pemuda dalam Pengembangan Perpustakaan Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat 2017*, 449–455.
- Asnawi, A. (2015). Perpustakaan Desa sebagai Sumber Layanan Informasi Utama. *Media Pustakawan*, 22(3), 34–40.
- Bahaudin, M. S., Wasisto, J., Studi, P., Perpustakaan, S.-I., Budaya, F. I., Diponegoro, U., ... Tembalang, K. U. (n.d.). *DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kualitatif Perpustakaan “ Pelita ” Desa Muntang)*.
- Efendi, A. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partispasi. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(September), 2580–2593.
- Ignatavicius. (2017). *Medical Surgical Nursing : Concepts For Interfressional Callaborative Care*. St. Louis: Elsevier, Inc.

- Kasming. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*.
- Kotler, P. (2006). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks.
- Kurniawati, R. D., & Prajarto, N. (2015). PERANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT: Survei pada Perpustakaan Umum Kotamadya Jakarta Selatan =THE ROLE OF THE LIBRARY IN IMPROVING THE READING HABIT OF SOCIETY :Survey at public library of South Jakarta district. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(7). <https://doi.org/10.22146/bip.8271>
- Mansyur, U. (2019). Gempusta: Upaya Meningkatkan Minat Baca. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra II FBS UNM*, (December), 203–2017. Retrieved from <https://osf.io/va3fk>
- Raharja, S. P. (2018). *Pemberdayaan masyarakat suku kokoda dalam membangun rumah baca berbasis inklusi sosial*. 1(1), 15–19.
- Ramadhani, P. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan perpustakaan desa di gampong lambheu kecamatan darul imarah kabupaten aceh besar. *Ilmu Administrasi Negara*, 67.
- Saeful, A. (2017). TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : STUDI KASUS DI DESA MARGAMUKTI - PANGALENGAN BANDUNG Transformation of Village Library for Community Empowerment : Case Study in Margamukti Village - Pangalengan Bandung. 26, 47–54. <https://doi.org/10.21082/jpp.v26n2.2017.p47-54>
- Sutarno. (2008). *Sutarno. Membina perpustakaan desa (Jakarta: Sagung seto,2008)*, h. 1-3. 1–33.
- Sutrisno, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suwarno, E. (2017). PERAN PERPUSTAKAAN DESA DALAM PENYEDIAAN SARANA INFORMASI BAGI MASYARAKAT DI DESA CURIO KECAMATAN CURIO KABUPATEN ENREKANG. *Ilmu Administrasi Negara*, 6, 5–9.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Peraturan Kepala Perpustakaan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan

Surat Keputusan Kepala Desa Sialang Kayu Batu No.141/SK-PD/SKB/2020/14 tentang Pembentukan Pengurusan Perpustakaan Desa ‘Sialang Cerdas’

Surat Keputusan SK Menteri dalam Negeri dan otonomi daerah nomor 3 tahun 2001

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 (LN Nomor 64 Tahun 1956) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 (LN Nomor 110 Tahun 1951) Sebagai urusan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional